



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

SOLUSI KONTEKSTUAL UNTUK MENGURANGI MENGULANG KELAS (MK) DAN PUTUS SEKOLAH (DO) DI SEKOLAH DASAR

PENDAHULUAN

Pada awal dimulainya penerapan K-13, pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) tidak ada lagi siswa SD yang mengulang kelas (MK). Meskipun demikian, sekolah-sekolah tetap melakukan evaluasi akhir kenaikan kelas, jika memperoleh nilai di bawah standar siswa tetap mengikuti ujian ulangan atau remedial (Hidayatullah, 2013). Dalam perkembangan berikutnya, ketentuan kenaikan kelas diatur dalam Permendikbud No 26 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, yang kemudian secara teknis mengacu pada Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud (2016). Panduan tersebut menyatakan bahwa kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan,

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 6 ayat 1 menetapkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ketetapan tersebut sering dikaitkan dengan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang merupakan hak setiap warga negara berusia 7-15 tahun. Artinya, dengan amanah tersebut seharusnya tidak ada lagi anak usia tersebut yang tidak bersekolah. Namun demikian pada praktiknya, ternyata masih terdapat siswa SD yang *drop out* (DO). (Perhati dkk, 2017). Walaupun secara data menunjukkan dari tahun ketahun terjadi penurunan jumlah siswa yang DO. Data yang bersumber dari Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan penurunan dari tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 176.909 anak DO menjadi 33.268 siswa DO di tahun ajaran 2018/2019.

Sementara itu, adanya siswa yang tidak naik/tinggal kelas. Meskipun bertujuan baik, agar siswa lebih siap mengenyam pembelajaran di kelas selanjutnya. Namun dalam jangka panjang bisa berdampak negatif terhadap peluang melanjutkan sekolah. Menurut Wicaksono (2018), siswa yang pernah tinggal kelas cenderung tidak melanjutkan pendidikannya.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbangbuk, Kemendikbud di tahun 2019 melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan dalam mengatasi permasalahan terjadinya MK dan DO di SD. Penjarangan informasi dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT) dengan

menghadirkan pejabat dinas pendidikan kabupaten, pengawas, kepala sekolah, guru SD, dan komite sekolah, serta melalui penyebaran kuisioner. Lokasi sampel ditentukan secara purposif, berdasarkan daerah yang memiliki jumlah siswa MK dan DO tinggi, antara lain Kab. Bogor (Jabar), Kab. Bangkalan (Jatim), dan Kab. Sumba Barat Daya (NTT).

HUBUNGAN MK TERHADAP DO

Hasil analisis yang dilakukan secara statistik korelasi antara MK dengan DO menunjukkan angka yang positif (signifikan). Korelasi MK dan Angka DO (APS) tahun 2016/2017 memperlihatkan bahwa keduanya berkorelasi positif sebesar 0,099 dan signifikan. Artinya, kenaikan MK sebesar 0,099 poin akan meningkatkan DO sebesar 1 poin sehingga MK perlu segera ditanggulangi supaya siswa tidak sampai DO.

Beberapa variabel yang relevan digunakan sebagai analisis terhadap faktor-faktor internal penyebab tingginya angka MK dan DO antara lain : 1) persentase siswa kelas awal non TK; 2) persentase kepala sekolah dan guru belum S1; 3) persentase kepala sekolah dan guru dengan masa kerja ≥ 20 tahun; 4) persentase SD memiliki sumber air dan cukup; 5) persentase SD memiliki toilet; dan 6) proporsi SD penyelenggara pendidikan secara kombinasi (pagi & siang). Sedangkan faktor eksternal yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesemua faktor internal maupun eksternal tersebut ternyata memiliki korelasi yang positif (signifikan) terhadap MK dan DO. Secara lengkap hasil analisis tersebut bisa dilihat pada laporan penelitian.

Namun demikian berdasarkan hasil DKT terhadap pejabat dinas pendidikan kabupaten, pengawas, kepala sekolah, guru SD, dan komite sekolah menyimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap MK dan DO terbagi:

1. Internal

Secara internal, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi mengajar, substansinya belum cukup maupun guru honorer. Guru honorer cenderung membebani sekolah dan membuat kepala sekolah “kurang berwibawa”. Artinya, jika kepala sekolah dinilai kurang mampu menyejahterakan mereka, kebijakan kepala sekolah kurang dipatuhi.

Selain guru, prasarana merupakan salah satu penyebab terjadinya MK dan DO. Idealnya, jumlah ruang kelas minimal harus sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Sekolah yang diselenggarakan pagi dan siang (kombinasi) cenderung disebabkan oleh kurangnya ruang kelas. Sebagai contoh, di Kabupaten Bogor ada SD yang menyelenggarakan pendidikan kombinasi, sehingga siswanya bisa mencapai lebih lima puluh orang. Penggabungan kelas dilakukan karena ada sekolah yang kekurangan ruang kelas. Ada juga penggabungan kelas/sekolah (masuk pada pagi hari) dikarenakan pada siang/sore hari siswa takut tertimpa oleh batu galian.

2 External

Pada faktor eksternal, yang mempengaruhi MK dan DO antara lain; Pertama, rendahnya status sosial ekonomi orang tua siswa. Kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya, bahkan pindah tempat kerja, hingga tidak sempat memikirkan kepentingan pendidikan anaknya. Di Bangkalan, misalnya, banyak orang tua siswa harus pindah ke kota lain untuk mencari nafkah dan kehidupan yang lebih baik. Banyak orang tua yang tidak melanjutkan sekolah anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi menyuruh siswa mencari pekerjaan atau membantu orang tua bekerja.

Kedua, masalah budaya. Banyak di daerah menganggap bahwa bagi perempuan, menikah di usia muda adalah budaya, sehingga menyebabkan anak DO. Budaya lainnya adalah hari pasaran. Di Bangkalan, hari pasaran adalah hari yang menggembirakan anak-anak, sehingga lebih senang ikut orang tuanya ke pasar daripada ke sekolah. Budaya mauludan atau perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW juga lebih menarik perhatian anak-anak daripada pergi ke sekolah. Upacara kematian juga mempengaruhi kehadiran siswa di sekolah sebagaimana terlihat di Sumba Barat Daya. Upacara kematian adakalanya dilakukan selama satu minggu, bahkan lebih, dan selama itu pula anak-anak bolos ke sekolah. Dapat dibayangkan jika terjadi upacara kematian secara berturut-turut, pendidikan anak-anak dapat terbengkalai.

Faktor ketiga adalah lokasi sekolah yang sulit dijangkau. Di Kabupaten Sumba Barat Daya ada desa atau tempat permukiman siswa yang selain jauh dari sekolah, sarana transportasi juga menjadi kendala, sehingga anak-anak enggan ke sekolah dan akhirnya menjadi DO.

Faktor ketiga adalah lokasi sekolah yang sulit dijangkau. Di Kabupaten Sumba Barat Daya ada desa atau tempat permukiman siswa yang selain jauh dari sekolah, sarana transportasi juga menjadi kendala, sehingga anak-anak enggan ke sekolah dan akhirnya menjadi DO.

REKOMENDASI

A. Dalam hubungannya dengan Pendidik (guru) dan Sarana Prasarana Sekolah

1. Untuk mengatasi banyaknya guru honorer yang memberatkan beban sekolah, perlu pengadaan guru yang sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan. Mengingat rekrutmen guru PNS tidak pernah mampu memenuhi kebutuhan, Ditjen GTK disarankan memenuhi kebutuhan guru melalui jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), terutama bagi daerah pedesaan (terpencil) dan 3T.
2. Program GGD (Guru Garis Depan) jangan terlalu cepat dihentikan, sebaiknya tetap dilanjutkan dengan beberapa perbaikan/penyesuaian. Perbaikan ditekankan diantaranya agar guru yang telah menandatangani “kontrak” tidak dapat mengajukan pemindahan tempat tugas dalam waktu minimal 10 tahun.
3. Upaya lain mengatasi banyaknya guru honorer adalah distribusi guru ke daerah pedesaan dan 3T. Rencana kebijakan rotasi penugasan guru bersatus PNS mencakup ke daerah pedesaan dan 3T agar segera diberlakukan, diawali dengan pemutakhiran Dapodik.
4. Untuk mengatasi masalah guru yang belum memenuhi kualifikasi, disdik perlu mengupayakan/mencarikan beasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Untuk meningkatkan kompetensi guru yang pendidikannya sudah sesuai kualifikasi, namun belum kompeten, mereka perlu diikutsertakan dalam program-program pelatihan dan pengembangan diri.
5. Memprioritaskan pelatihan bagi guru-guru dari daerah pedesaan (terpencil) dan 3T dalam upaya meningkatkan kompetensi substansi dan kompetensi mengajar.
6. Mendorong peningkatan kapasitas dan aktivitas KKG (Kelompok Kerja Guru), terutama, di daerah pedesaan dan 3T, antara lain dengan memberikan pembinaan/pendampingan oleh LPTK terdekat dan pemberian insentif pendanaan. Perlunya murid-murid SD, terutama kelas rendah dididik oleh guru-guru yang lebih berpengalaman mengajar. Akan lebih baik jika aturan tersebut dijadikan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota. Semakin lama pengalaman guru mengajar, semakin rendah kelas yang dididik.
7. Pengadaan dan perbaikan (renovasi) prasarana dan sarana sekolah agar memprioritaskan daerah pedesaan (terpencil) dan 3T. Mengingat, pembiayaan pengadaan atau perbaikan prasarana dan sarana sekolah di daerah urban maupun transisi lebih memungkinkan mendapat kontribusi dari orangtua atau masyarakat.
8. Prasarana Pendidikan, terutama ruang kelas. Disdik mengupayakan agar seluruh SD menyelenggarakan pendidikan di pagi hari, meskipun ada daerah tertentu yang menyelenggarakan pendidikan SD pada siang hari untuk mengakomodasi anak-anak yang bekerja secara informal pada pagi hari. Jumlah ruang kelas yang perlu disediakan minimal sesuai jumlah rombongan belajar.
9. Prasarana lainnya yang perlu tersedia di setiap SD adalah sumber air yang cukup dan toilet, agar anak-anak nyaman di sekolah, apalagi untuk siswa-siswa kelas tinggi yang di sekolah dari pagi sampai siang hari.

A. Dalam hubungannya dengan peran/kontribusi Pemerintah dan Pemda

1. Penyebab eksternal terutama adalah rendahnya tingkat status sosial ekonomi yang ditandai oleh rendahnya kesejahteraan masyarakat dan aspirasi terhadap Pendidikan. Sehubungan dengan itu, disarankan agar Pemda mengkoordinir beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan institusi lain di wilayahnya yang terkait dengan masalah pendidikan, khususnya terkait dengan faktor-faktor penyebab MK dan DO yang diluar kendali kewenangan Disdik, untuk ikut bersama dengan Disdik mengadakan program/kegiatan dalam rangka penanggulangan MK dan DO, yaitu antara lain dengan: Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, dan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) untuk meningkatkan keterampilan orangtua berbasis unggulan daerah/kearifan lokal dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran/persepsi orangtua/ masyarakat akan pentingnya pendidikan anak, dan jangan memberikan peluang pada anak usia dikdas untuk bekerja dan/atau dinikahkan. Alternatif lain adalah menyelaraskan pendidikan keluarga atau pendidikan orang tua, oleh disdik kabupa ten/kota, sekolah dan/atau komite sekolah bekerjasama dengan berbagai pihak yang relevan.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Dinas Pariwisata dan Budaya perlu memberikan pemahaman/kesadaran kepada orangtua/masyarakat dengan pendekatan budaya, tentang pentingnya pendidikan umum disamping pendidikan keagamaan, dan sedapat mungkin tidak melibatkan/mengikutsertakan anak-anak usia dikdas dalam acara-acara peringatan keagamaan dan/atau perayaan adat budaya.
4. Untuk mengatasi layanan akses yang sulit karena lokasi sekolah jauh dari pemukiman maupun lokasi sekolah terletak di daerah 3T, hendaknya Pemda berupaya, di antaranya dengan membangun jalan penghubung pemukiman dengan sekolah dan pengadaan sarana transportasi.
5. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, pendekatan *problem driven iterative adaptation* (PDIA) dapat diterapkan sebagai upaya mencari solusi. Diawali dengan pelatihan dan pendampingan serta penyebarluaskan hasil yang sudah menunjukkan keberhasilan.
6. Hendaknya Pemerintah dan Pemda mendorong, menjadikan kebijakan dan memfasilitasi penyelenggaraan PAUD minimal satu tahun sebelum memasuki SD.

DAFTAR RUJUKAN

Perhati, Tina Aris, Indahwati, Susetyo, Budi. 2017.” Identifikasi Karakteristik Anak Putus Sekolah di Jawa Barat dengan Regresi Logistik”. *Indonesian Journal of Statistics and Applications*, Vol 1 No 1 (2017), 56 – 65

Hidayatullah, F. <https://www.solopos.com/kebijakan-tidak-naik-kelas-siswa-sd-dihapus-470558>, 2 Desember 2013 (Diakses 3 Oktober 2019 jam 11:55 WIB)

Wicaksono, T. Y. <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/11/14/cenderung-berdampaknegatif-bagi-anak-kebijakan-tinggal-kelas-perlu-dikaji>, 14 November 2018 (Diakses 3 Oktober 2019 jam 14:35 WIB)



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.

Tim penyusun:

Siswantari
Darmawan Sumantri
Dyah Suryawati